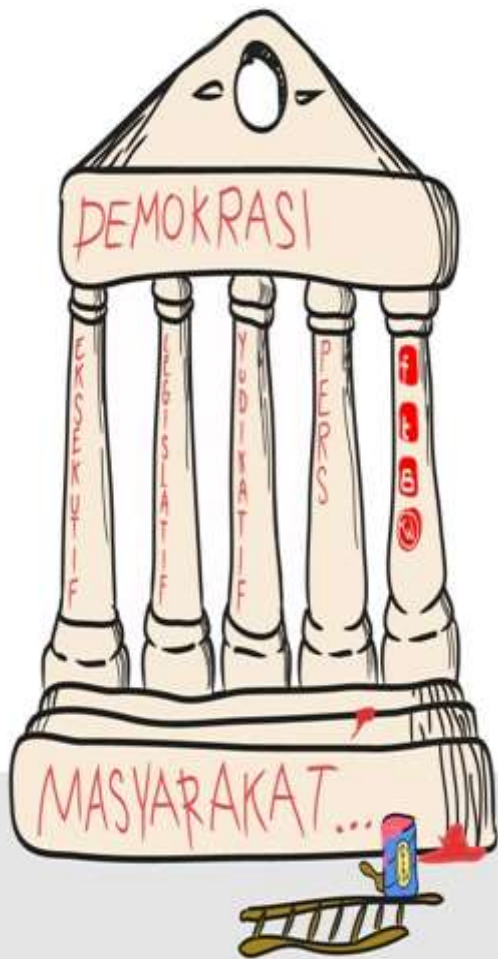


# DEMOKRASI DAN BELA NEGARA



KEDAULATAN  
RAKYAT

BELA  
NEGARA

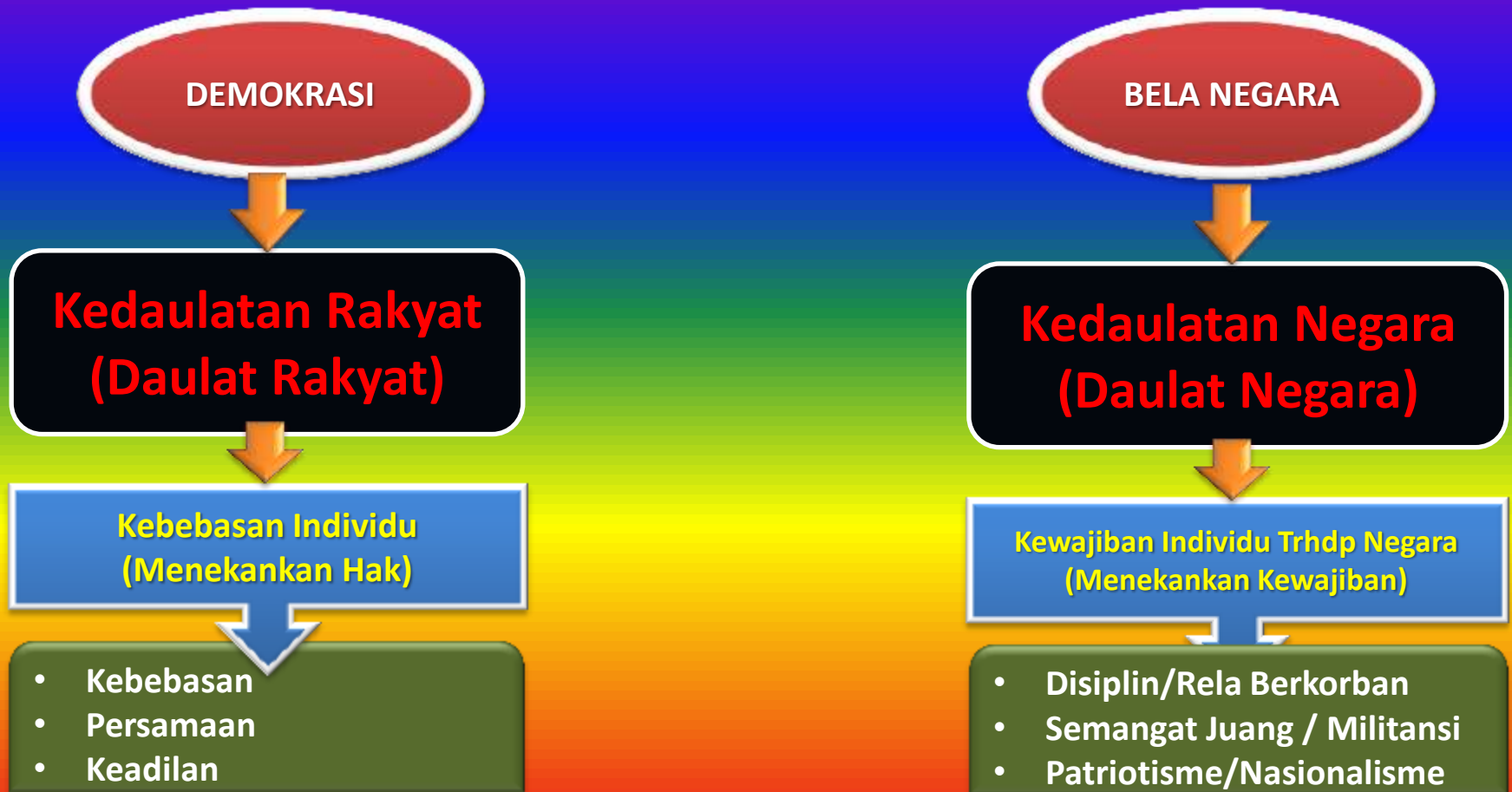


DOSEN :

DR. AGUS SUBAGYO, S.IP., M.SI (DEKAN FISIP UNJANI CIMAHI)

Dipresentasikan kepada Perwira Siswa (Pasis) Seskoad Dikreg 57 TA 2019,  
Pada Tanggal 15 Oktober 2019, di Gedung Gatot Soebroto Seskoad, Bandung

# HUBUNGAN DEMOKRASI & BELA NEGARA



- **Semakin Rendah Tingkat Bela Negara, Maka Semakin Sulit Terciptanya Demokrasi, Malah / Justru Menimbulk**n Anarki.
- **Semakin Tinggi Tingkat Bela Negara, Maka Semakin Mudah Terciptanya Demokrasi, Sehingga Akan Lahir Prosperity**

DEMOKRASI



DEMOKRASI

# Hakekat Demokrasi

1. Etimologis : “Demos” & “Kratos / Kratein”.
2. Demos : Rakyat, Kratos : Kekuasaan.
3. Kekuasaan di tangan Rakyat / kekuasaan rakyat.

## Definisi

1. Prinsip Voting : “One Man One Vote”.
2. Diadaptasi oleh MU PBB : “One State One Vote”.
3. Dlm Dunia Modern Menjadi : “One People One Vote”

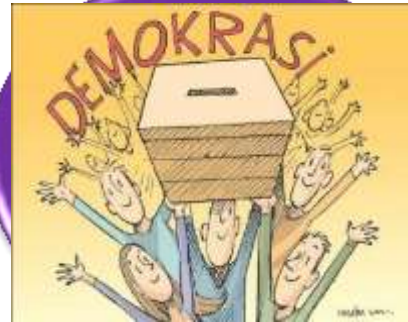
## Slogan

1. Abraham Lincoln : “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat”.
2. Kedaulatan Rakyat / Rakyat Yang Berdaulat.

## Sejarah

1. Cikal Bakal Demokrasi di Yunani Kuno.
2. Demokrasi Yang Dianut adlh Demokrasi Langsung, Berdsrkan suara Mayoritas Warga / Rakyat.
3. Demokrasi : Voting : Suara Terbanyak / Kuantitas

## Prinsip / Nilai



# Transformasi Demokrasi

## Perubahan Pola Demokrasi

Dari Demokrasi  
Langsung Menjadi  
Demokrasi Tdk  
Langsung

Praktek Demokrasi  
Saat Ini Adlh  
Demokrasi  
Perwakilan.  
Kepentingan Rakyat  
Diwakilkan Oleh  
Anggota Parlemen

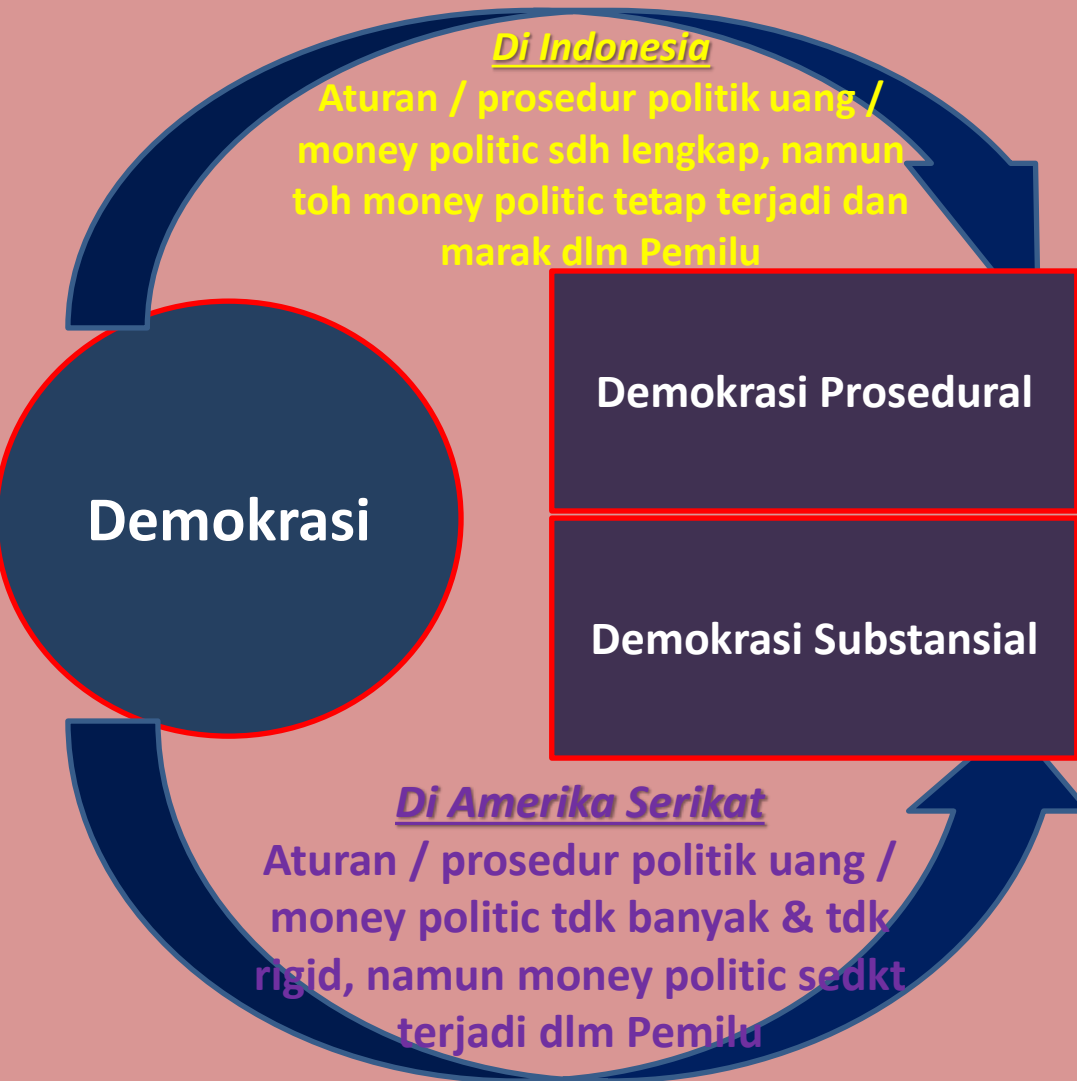
Dari Hak Pilih Kaum  
Laki-Laki Diperluas  
Menjadi Wanita &  
Budak

Di Jaman Modern,  
Semua Orng  
Tanpa Terkecuali  
Memiliki Hak Pilih  
/ Hak Politik

Dari Negara Kota  
(Polis) Menjadi  
Negara Bangsa  
(Nation State)

Demokrasi  
Diterapkan Dlm  
Sistem Negara  
Bangsa, Bkn Lagi  
Negara Kota /  
Polis

# Jenis-Jenis Demokrasi



- Demokrasi yg menekankan pd prosedur, SOP, Protap, aturan, & regulasi.
  - Setiap orng / elit / pejabat tdk akan melanggar hkm & mengkhianati aturan demokrasi jika dibatasi oleh aturan / prosedur / regulasi.
- 
- Demokrasi yg menekankan pd budaya, mentalitas, moralitas, kultur manusia.
  - Sebagai apapun prosedur / regulasi dibuat, pasti akan dicari celah kelemahan aturan trsbt oleh orng / elit / pejabat.
  - Yg diperlukn adlh membangun jiwa manusia / elit / pejabat shg tanpa aturan pun, pasti akan mengikuti etika demokrasi.

# Relasi Monarki, Oligarki, & Demokrasi

## Monarki

Pmrinthn  
Oleh  
**SATU (1)**  
Orng

Umumnya Dlm Sistem Kerajaan, ada tp tdk banyak negara menganut ini

## Oligarki

Pmrthn  
Oleh  
**BEBERAP/  
SGELINTIR**  
Orng

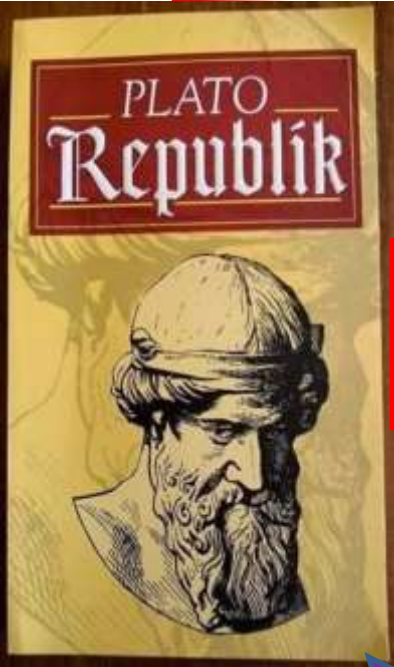
Umumnya dlm sistem yg otoriter / totaliter, jarang negara ini menganut sistem ini

## Demokrasi

Pmrthn  
Oleh  
**BANYAK**  
Orng

Paling banyak dianut oleh sebagian besar negara di dunia, trmsk Indonesia

**Plato Tidak Setuju Dengan  
Demokrasi,  
Demokrasi Melelahkan,  
Demokrasi Mahal Harganya.**



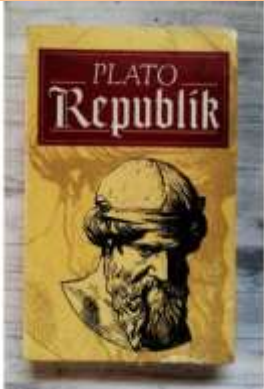
**Filsuf Besar  
Yunani Kuno,  
Plato,  
(428-348 SM)**

**"Bisa Jadi Demokrasi  
Menjadi Mimpi Buruk  
Dalam Sistem  
Pemerintahan di  
dunia"**

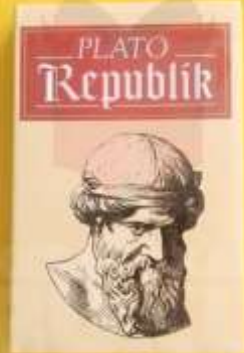
- Demokrasi bisa mengarah pada gerombolan 'mafia' pemuas hasrat sesaat.
- Demokrasi dikuasai pandir / Orng Bodoh / Bebal yang hanya pintar beretorika.
- Demokrasi mengarah pada intrik pertikaian.



# Plato mengsulkn Filosof / Brahmana atau Raja / kesatria utk menjadi pemimpin negara



Filosof / Brahmana tlg  
mencapai taraf :  
“NIHILISME KEPENTINGAN”



“Pemimpin harus sdh selesai dengan kepentingan dirinya sendiri”  
“Pemimpin idealnya sdh tdk memiliki urusan / permasalahan perut”  
“Pemimpin sebaiknya sudah berakhir dengan urusan duniawi”

“Tdk Amanah Jika Pemimpin Msh  
Berurusan Dengan Urusan Perut /  
Materi / Duniawi”

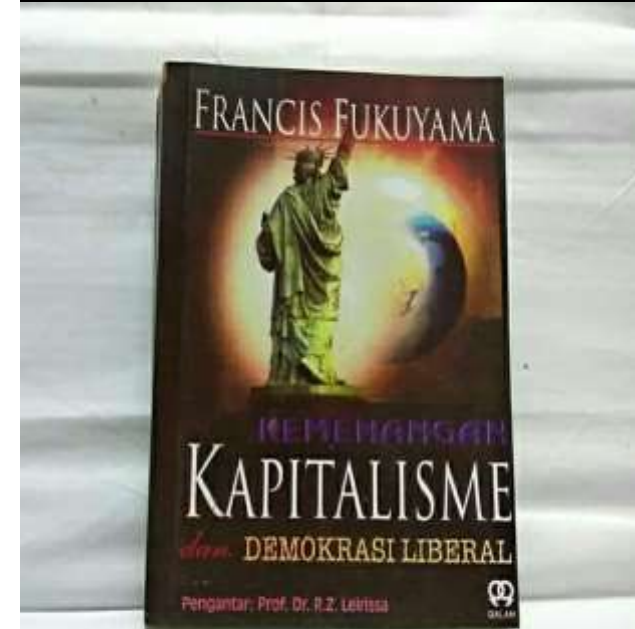
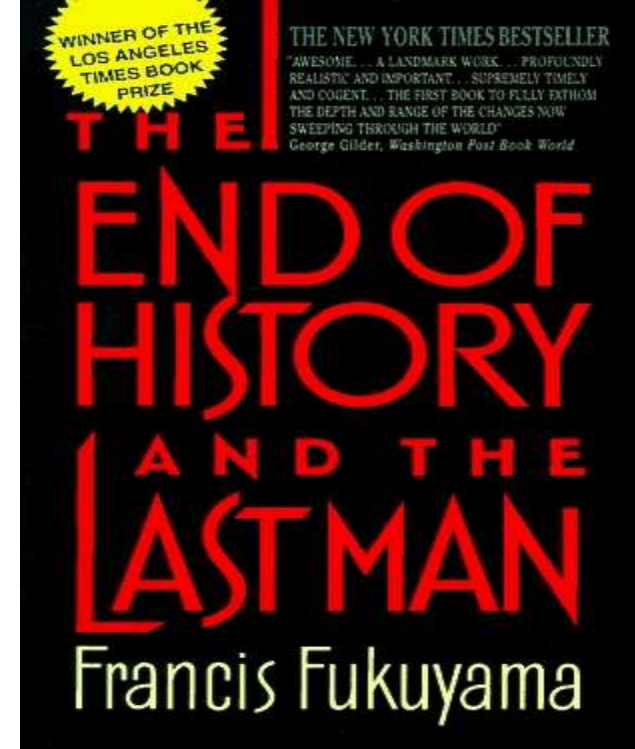
“Demokrasi melahirkan anarki”

**Perang Dingin dimenangkan oleh Blok Barat, Blok AS, Blok Liberalisme-Kapitalisme**

**Pasca Perang Dingin, Demokrasi Liberal dan Ideologi Kapitalisme menjadi "The Winner"**

**Demokrasi Liberal adlh hasil dari "seleksi alam" stlh mengalami pergulatan dgn sosialisme komunisme**

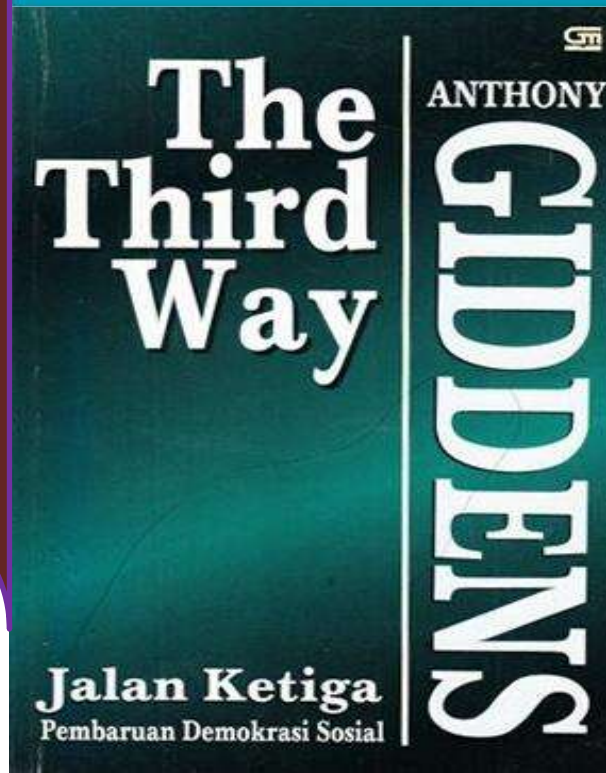
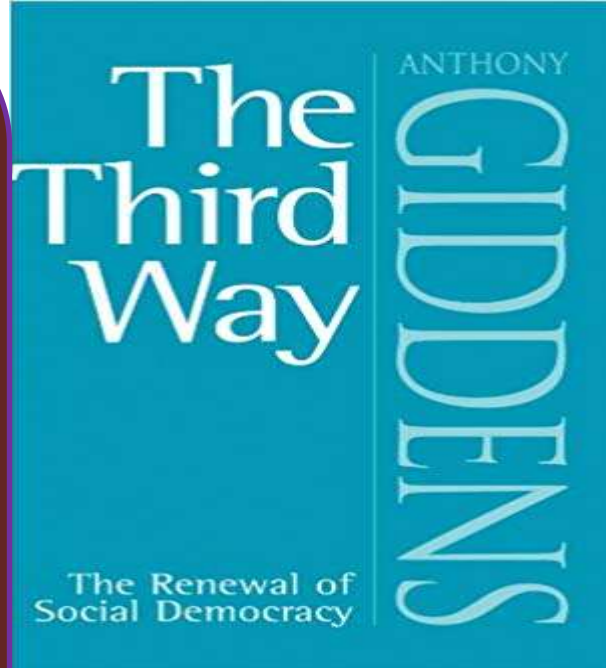
**"Demokrasi Liberal Dengan Senyawa Ideologi Kapitalisme Akan Dianut Oleh Seluruh Negara Di Dunia"**



**Tesa :**  
**Sosialisme –**  
**Komunisme**

**Anti Tesa :**  
**Liberalisme –**  
**Kapitalisme**

**Sintesa :**  
**Demokrasi Sosial /**  
**Social Democracy**



**Jalan Pertama :**  
**“Jalur**  
**Sosialisme”**

**Jalan Kedua :**  
**“Jalur**  
**Liberalisme”**

**Jalan Ketiga :**  
**“Jalur Demokrasi**  
**Sosial”**

Cowinner of the 1992 Grawemeyer Award  
for Ideas Improving World Order

**Samuel P.  
Huntington**

Vote here  
Vota aquí  
THE  
**THIRD  
WAVE**

DEMOCRATIZATION IN THE  
LATE TWENTIETH CENTURY

**Samuel P.  
Huntington**

**GELOMBANG  
DEMOKRATISASI  
KETIGA**

"Sumbangan... buku ini ialah...  
memberikan petunjuk bagi demokratisator  
tentang bagaimana menurunkan  
pemerintah otoriter maupun  
mengkonsolidasikan rezim demokrasi."  
Myron Weiner, MIT



**Gelombang  
Demokrasi Pertama  
(1820-AN – 1918)**

Revolusi Perancis  
dan Revolusi  
Amerika Serikat

**Gelombang  
Demokrasi Kedua  
(1945 – 1962)**

Jerman, Jepang,  
Italia, Korea,  
Yunani, Turki,  
Austria

**Gelombang  
Demokrasi Ketiga  
(1974 – Skrng)**

- Yunani, Spanyol, Portugal, Brasil, Argentina.
- Taiwan, Philipina, Afrika Selatan.
- Negara - Negara Eks Uni Soviet

**"Demokrasi seperti gelombang lautan yg menyapu belahan dunia / negara-negara di kawasan"**

**"Demokrasi laksana gelombang ombak yg bisa pasang surut / naik turun / tinggi rendah"**

# Demokrasi Di Kawasan Arab / Arab Spring

REPUBLIKA.co.id

## DEMONSTRASI GULINGKAN 6 PEMIMPIN ARAB

Pemimpin dari enam negara anggota Liga Arab lengser dari jabatannya dalam 10 tahun terakhir. Mereka digulingkan dari jabatannya setelah demonstrasi rakyat yang menghendaki reformasi. Empat pemimpin di antaranya lengser dalam fenomena yang kerap dijuluki Arab Spring pada 2011.



REPUBLIKA.co.id

2011

**Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali** mundur setelah memerintah selama hampir 25 tahun. Dia meninggalkan takhtanya setelah demonstrasi di seluruh penjuru Tunisia.

2011

**Presiden Mesir Husni Mubarak** mundur dari jabatannya setelah demonstrasi pecah pada Februari. Mubarak berkuasa selama 30 tahun.

2011

**Muammar Qadafi** lengser dari jabatan perdana menteri Libya setelah 40 tahun memerintah. Dia tewas karena ditembak setelah ditangkap oposisi.

2011

**Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh** melepaskan jabatannya setelah demonstrasi berlangsung selama tiga bulan. Enam tahun kemudian dia dibunuh oleh kelompok pemberontak Houthi.

2019

**Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika** mengundurkan diri setelah demonstrasi berlangsung berpekan-pekan. Ia meninggalkan jabatannya setelah memerintah selama 20 tahun.

2019

**Presiden Sudan Omar al-Bashir** mundur setelah 30 tahun memerintah. Demonstrasi berlangsung akibat krisis yang dipicu AS memasukkan Sudan sebagai negara pendukung terorisme.

Proses Demokratisasi di Negara-Negara Arab, Apakah Ini Bisa Disebut Sebagai Gelombang Demokrasi Keempat,,,,,?????

2010 -AN

Fenomena tumbangnya rezim otoriter yg berkuasa puluhan tahun

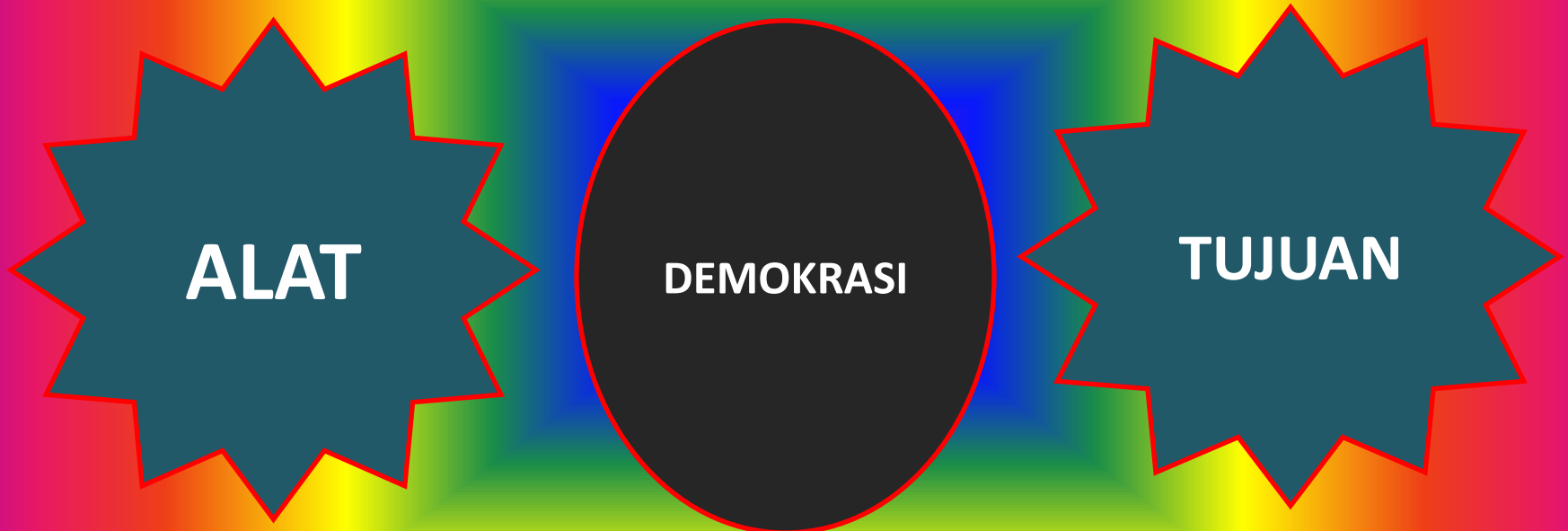
Ketakutan Negara-Negara Arab yg monarki / kerajaan trhdp gelombang Arab Spring

Arab Spring bisa melahirkn transisi menuju demokrasi atau Anarki

# Demokrasi : Alat Atau Tujuan

**Pertanyaan Besarnya Adalah :**

**“Apakah Ada Pengaruh Antara Demokrasi dan Kesejahteraan?”**



- **Demokrasi adalah Alat, Bukan Tujuan.**
- **Tujuan dari Negara adalah Kesejahteraan.**
- **Untuk Mencapai kesejahteraan, diperlukan alat (salah satunya) Demokrasi.**

**Ketika Negara  
Msh Miskin /  
Melarat,  
Fokuslah Ke  
Pemb Ekonomi  
(Ksejahteraan)**



**Ketika Negara  
Sdh Maju /  
Kaya,  
Fokuslah Ke  
Pemb Politik  
(Demokrasi)**

**Sen : “Seharusnya, Tidak Ada Bencana Kelaparan Yang Muncul Di Negara-negara Yang Demokratis Dan Memiliki Pers Bebas”**

**“Jangan Berbicara Demokrasi Dalam Perut Kosong”**

**“Demokrasi Masih Menjadi Barang Mahal Bagi Kaum Miskin”**

**“Demokrasi Sulit diterapkan Dalam Kondisi Negara Yg Miskin”**

# Kritik Terhadap Demokrasi

Dalam  
Prakteknya,  
Demokrasi  
Mahal

Secara Riel, Demokrasi  
Melelahkan, Berpotensi  
Menimbulkan Anarki

Menekankan  
Kuantitas / Jumlah

Kritik  
Demokrasi

Mengabaikan  
Kualitas / Mutu

Orng yg memiliki uang,  
popularitas, kekayaan yg  
akan menang dlm kompetisi  
demokrasi

Orng yg jujur & bermoral,  
namun miskin / tdk ada  
modal, tdk bisa menang dlm  
kompetisi demokrasi



# Demokrasi Dalam Pilkadaes, Pilkada, & Pilpres

Silahkan Cermati, Masihkah Kita Menginginkan Demokrasi Langsung...

Pendekatan  
Ekonomi Dlm  
Demokrasi

VS

Pendekatan  
Politik Dlm  
Demokrasi

- Pilkadaes, Pilkada, Pilpres Scr Langsung mrpkn pemborosan.
- APBD Pilkadaes : 65 Juta – 100 Juta.
- APBD Pilkada Kab / Kota : 20 M – 60 M.
- APBD Pilkada Prop : 100 M – 1 Triliun
- APBN Pilpres : 25 Triliun
- Ini Blm pengeluaran pribadi masing-masing calon utk tim sukses, rental partai, alat peraga kampanye, dll, yg besarnya puluhan bahkan ratusan milyar per calon.
- Hanya memilih 1 atau 2 pemimpin saja, membutuhkn biaya mahal, blm tentu jg calon terpilih berkualitas / sesuai keinginan rakyat.
- Lebih baik Pilkada & Pilpres melalui cara tdk langsung / MPR dan DPRD.

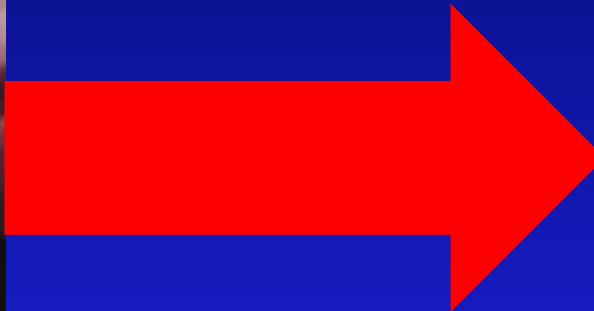
- Meski mengeluarkan biaya banyak, itulah demokrasi, jalan yg disepakati sjk reformasi.
- Kedaulatan ditangn rakyat shg rakyat yg hrs memilih pimpinannya scr langsung dlm Pilkada & Pilpres.
- Memang mahal, shg dikatakan bahwa “demokrasi itu mahal”.
- Memang melelahkan, krn demokrasi bnyk tahapan / prosedurnya.
- Bahkan, demokrasi dlm Pilkada & Pilpres scr langsung berpotensi anarki dan kekacauan sosial.
- Itulah harga yg hrs dibayar ketika kita memilih jalur / jalan demokrasi.

# SEJARAH PILPRES TIDAK LANGSUNG



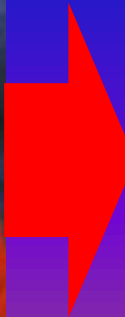
**Orde  
Lama**

Pemilihan  
Tidak  
Langsung



**Orde  
Baru**

Pemilihan  
Tidak  
Langsung



**Orde  
Reformasi**

Pemilihan  
Tidak  
Langsung

# SEJARAH PILPRES SCR LANGSUNG

## Orde Reformasi

Pilpres 2004



Pilpres 2009



Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Prof. Dr. Boediono

Pilpres 2014



Pilpres 2019



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



**Soekarno**  
(Agu. 1945 – Mar. 1967)



**M. Soeharto**  
(Mar. 1967 – Mei 1998)



**Bacharuddin Jusuf Habibie**  
(Mei 1998 – Okt. 1999)



**Abdurrahman Wahid**  
(Okt. 1999 – Jul. 2001)



**Megawati Soekarnoputri**  
(Jul. 2001 – Okt. 2004)



**Susilo Bambang Yudhoyono**  
(Okt. 2004 – Okt. 2014)



**Joko Widodo**  
(Okt. 2014 – sekarang)

# WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



**Mohammad Hatta**  
(Agu. 1945 – Des. 1966)



**Hamengku Buwono IX**  
(Mar. 1973 – Mar. 1978)



**Adam Malik**  
(Mar. 1978 – Mar. 1983)



**Umar Wirahadikusumah**  
(Mar. 1983 – Mar. 1988)



**Sudharmono**  
(Mar. 1988 – Mar. 1993)



**Try Sutrisno**  
(Mar. 1993 – Mar. 1998)



**Bacharuddin Jusuf Habibie**  
(Mar-Mei 1998)



**Megawati Soekarnoputri**  
(Okt. 1999 – Jul. 2001)



**Hamzah Haz**  
(Jul. 2001 – Okt. 2004)



**M. Jusuf Kalla**  
(Okt. 2004 – Okt. 2009)



**Boediono**  
(Okt. 2009 – Okt. 2014)

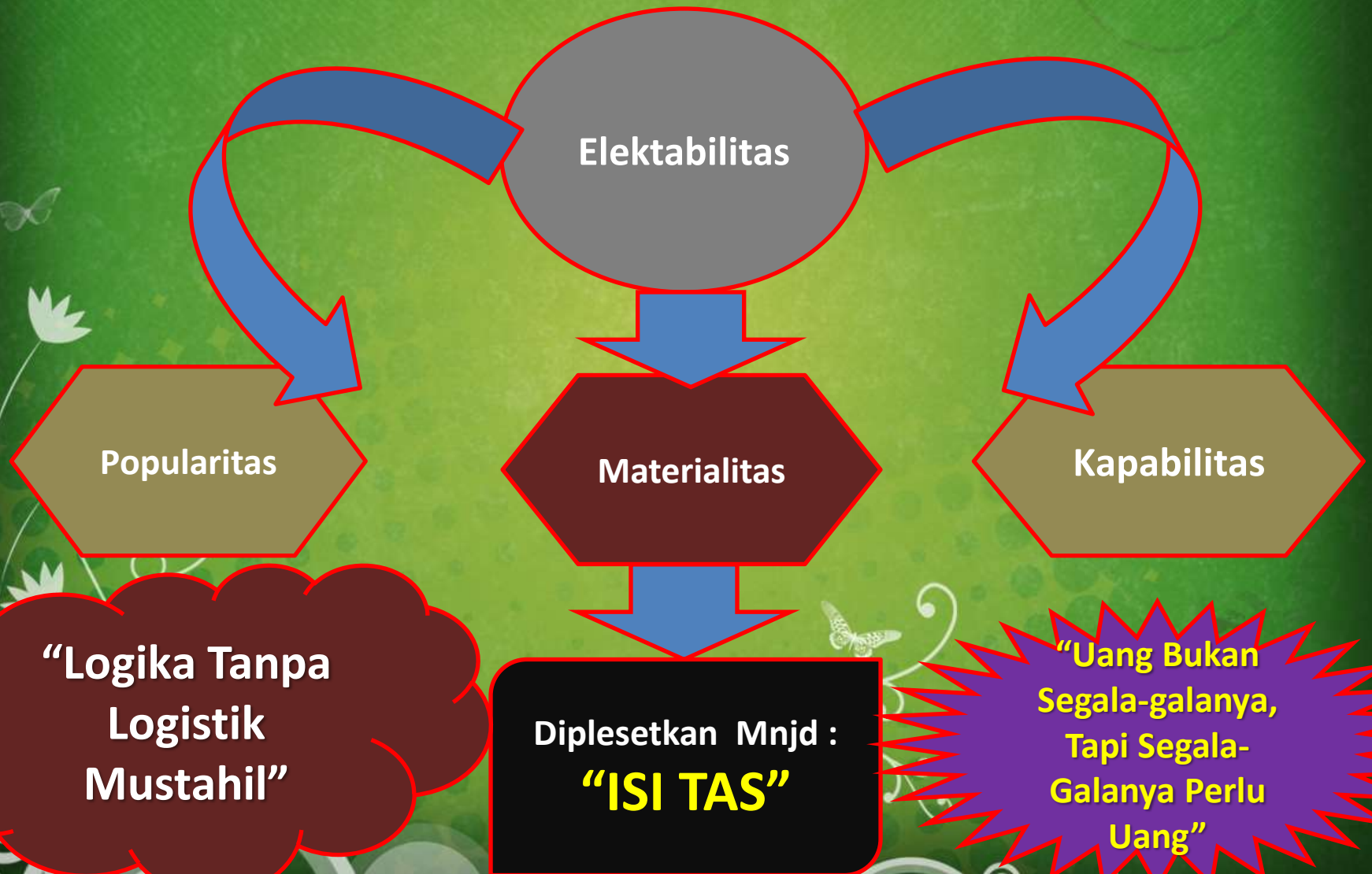


**M. Jusuf Kalla**  
(Okt. 2014 – sekarang)

- Dalam Perspektif Sipil-Militer, hanya 2 Presiden RI yang berasal dari “MILITER”. Selebihnya, 5 Presiden RI berasal dari “SIPIL”.
- Selanjutnya, Wapres RI dari “MILITER” hanya 3 orang, Wapres dari “SIPIL” 8 orang.

# Demokrasi : “Perspektif Teori Elektabilitas”

Disadur Dalam Teori Elektabilitas Versi David Morgan



# Mahalnya Demokrasi di Indonesia

## BIAYA SAKSI

### DATA KPU

- Jumlah Pemilih (DPT) → 30.664.958 orang.
- Jumlah TPS → 68.000

### RINCIAN ANGGARAN

- TPS → 2 orang x 68 ribu TPS x Rp.500.000 = Rp.68.000.000.000
- PPS → 1 orang x 8.505 x Rp.500.000 = Rp.4.252.500.000
- PPK → 2 orang x 664 x Rp.500.000 = Rp.664.000.000
- Kab → 3 orang x 38 x Rp.500.000 = Rp.57.000.000
- Prov → 3 orang x 1 x Rp.500.000 = Rp.1.500.000

TOTAL ANGGARAN = Rp. 72.975.000.000

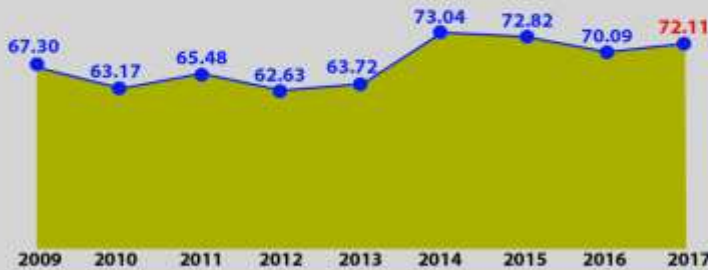
(Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

- Ilustrasi Biaya Saksi Dalam Pilkada, Utk Menunjukkan Mahalnya Biaya Dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres.
- Ini Baru Biaya Saksi, belum “mahar politik”, tim sukses, biaya kampanye, logistik, iklan, dll.

# Indeks Demokrasi Indonesia 2017

IDI dinilai berdasarkan 3 Aspek, 11 Variabel, dan 28 Indikator.

Dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, nilai IDI fluktuatif. Pada tahun 2017, nilai IDI naik menjadi 72,11. Angka tersebut masih masuk ke dalam katagori sedang.



**NAIK**  
2.02 POIN

## Aspek Kebebasan Berpendapat **78.75** **NAIK 2.30 POIN**



6 dari 10 Indikator mengalami peningkatan. Meskipun meningkat, Indikator 4 (Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat) tetap dalam kategori Buruk, yaitu 51.47.

## Aspek Hak-Hak Politik **66.63** **TURUN 3.48 POIN**



2 dari 7 Indikator mengalami peningkatan. Namun, Indikator 15 (Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Provinsi) dan Indikator 16 (Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan) tetap dalam kategori Buruk, yaitu 57,31 dan 29,22.

## Aspek Lembaga Demokrasi **72.49** **NAIK 10.44 POIN**



8 dari 11 Indikator mengalami peningkatan. Namun, Indikator 21 (Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD), Indikator 22 (Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif), dan Indikator 26 (Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah) tetap dalam kategori Buruk, yaitu 44.90, 17.23, dan 38.72.

# INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2018

Berita Resmi Statistik No. 58/07/Th. XXII, 29 Juli 2019



**72,39**  
IDI 2018

**0,28 POIN**

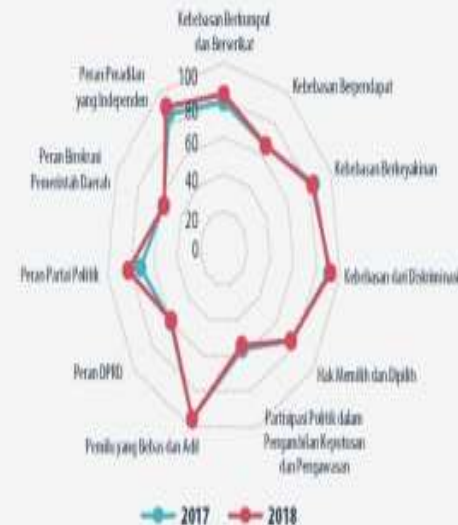
Meskipun meningkat dibandingkan tahun 2017, IDI 2018 masih berada pada kategori sedang

**3** ASPEK IDI

KEBEBASAN SIPIL  
**78,46**  
0,29 POIN

HAK-HAK POLITIK  
**65,79**  
0,84 POIN

LEMBAGA DEMOKRASI  
**75,25**  
2,75 POIN

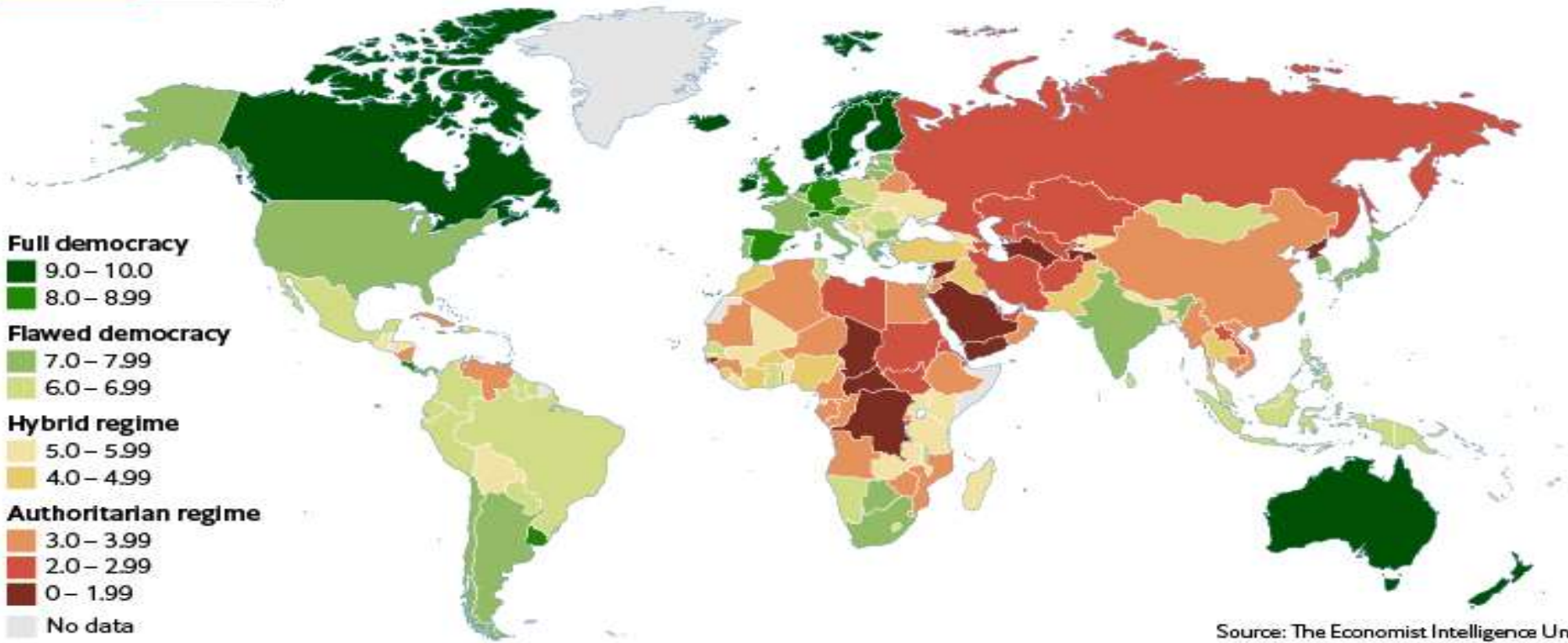


## 11 VARIABEL IDI



Masih terdapat 3 variabel berkategori buruk pada tahun 2018, yaitu variabel **Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (54,28)**, **Peran DPRD (58,92)**, dan variabel **Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (55,74)**

# Democracy Index 2018



Source: The Economist Intelligence Unit.

## THESE ARE THE TOP 20 MOST DEMOCRATIC COUNTRIES IN THE WORLD, 2018



Country	Population	Country	Population
1. Norway	5.258 million	11. Netherlands	17.08 million
2. Iceland	5.503 million	12. Luxembourg	0.62 Million
3. Sweden	9.995 million	13. Germany	82.79 million
4. New Zealand	4.794 million	14. United Kingdom	66.02 million
5. Denmark	5.77 million	15. Uruguay	3.457 million
6. Canada	36.71 million	16. Austria	8.773 million
6. Ireland	4.784 million	17. Mauritius	1.265 million
8. Finland	5.503 million	18. Malta	0.48 Million
9. Australia	24.6 million	19. Spain	46.57 million
10. Switzerland	8.42 million	20. Costa Rica	4.906 million





# BELA NEGARA

## LIMA UNSUR DASAR BELA NEGARA

- **CINTA TANAH AIR**
- **KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.**
- **YAKIN AKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA.**
- **RELA BERKORBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA.**
- **MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA**

## Ciri-ciri Patriotisme :

- **Cinta tanah air**
- **Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara**
- **Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan**
- **Berjiwa pembaharu**
- **Tidak kenal menyerah dan putus asa**

## Dasar Hukum Bela Negara

- Pembukaan UUD 1945 alinea IV:  
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah darah Indonesia
- Pasal 27 ayat(3); " Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"
- Pasal 30 ayat (1) dan (2) ang menyatakan ;" bahwas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung"
- UU NO 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Bela negara bukan semata mata kewajiban TNI karena harus melibatkan pula rakyat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung
- PERMENDAGRI No.38 Tahun 2011 Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA TAHUN 2018-2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;  
2. Sekretaris Kabinet;  
3. Jaksa Agung;  
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
6. Kepala Badan Intelijen Negara;  
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;  
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;  
9. Para Gubernur; dan  
10. Para Bupati/Walikota.
- Untuk :  
PERTAMA : Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:  
1. Tahap Sosialisasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Evaluasi;  
2. Tahap Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara; dan  
3. Tahap Aksi Gerakan,  
dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.



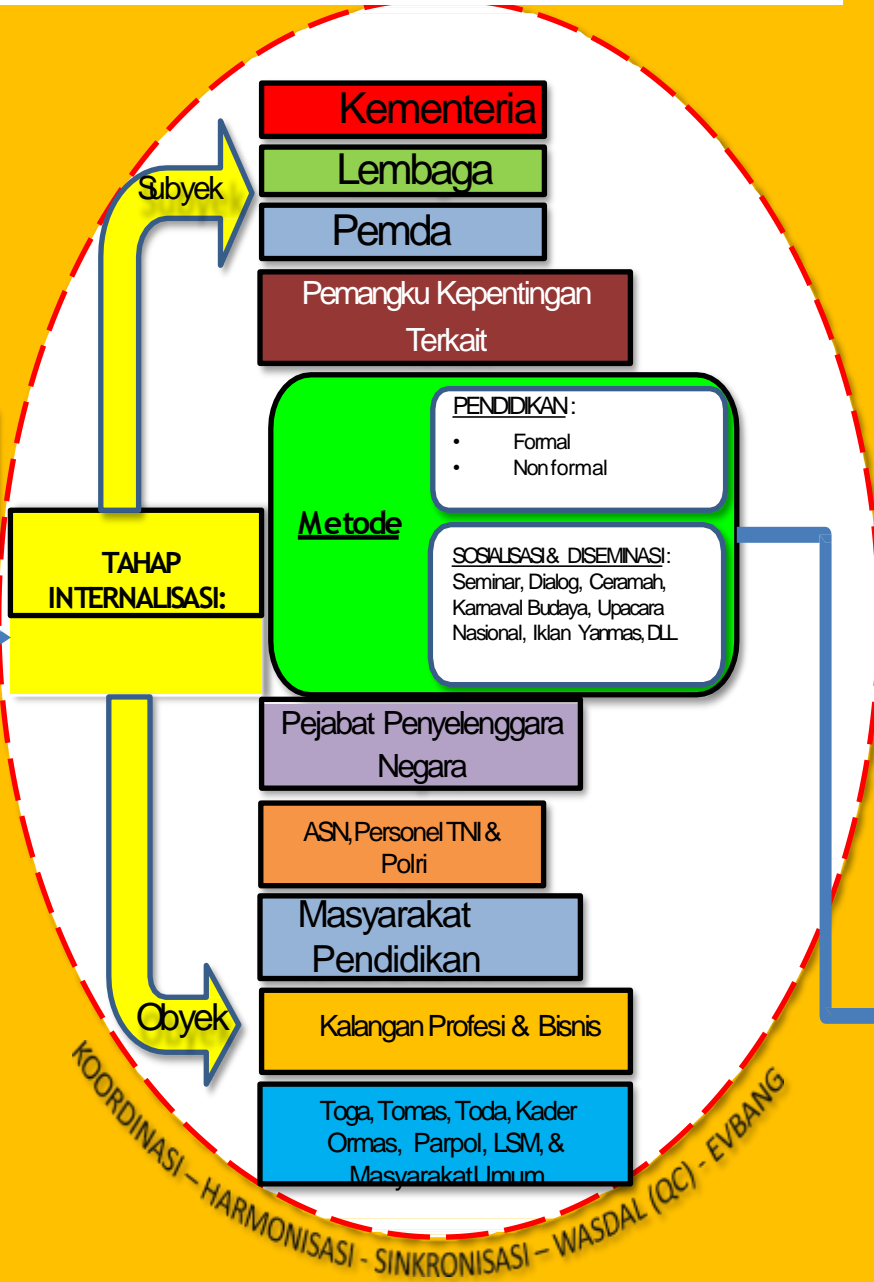
# LAMPIRAN INPRES

- Pengaturan secara Makro Aksi, Pelaksana dan Indikator keberhasilan
- Tahapan RANBelneg:
  - Tahap Sosialisasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
  - Tahap Internalisasi Nilai2 Dasar Bela Negara
  - Tahap Aksi Gerakan (Aksi Implementatif dalam mengatasi ancaman faktual dan potensial di tiap Gatra)



# VISUALISASI INPRES NO7 THN 2018 & KONSEPSI AKSI NASIONAL BELANEGARA

**INPRES Aksi Nasional Belneg**



Terjaminnya Keselamatan & Kelangsungan Hidup Bangsa & NKRI

Terkawalnya Upaya Mencapai Cita-cita & Tujuan Negara

Terwujudnya Situasi Bermasyarakat, Berbangsa & Bernegara Yang Kondusif.

**TAHAP AKSI GERAKAN BELA NEGARA**  
berdasarkan spektrumancaman tiap gatra: Demo Geo SKA-LH I-Pol-Ek-Sosbud+Tek-Hankam

**PENANAMAN NILAI<sup>2</sup> DASAR BELA NEGARA :**

- Cinta Tanah Air
- Sadar Berbangsa & Bernegara
- Setia Ideologi Pancasila
- Rela Berkorban Demi Bangsa & Negara
- Memiliki kemampuan awal

# DINAMIKA PEMBAHASAN UU PSDN

1. Memerlukan waktu s.d. 17 Tahun.
2. Sulit Masuk Prolegnas & Berganti-ganti Anggota DPR, shg berlarut-larut

Lama Pembahasan

1. Disepakati dan Disetujui oleh DPR pada tgl 26 Sept 2019.
2. Rapat Paripurna dihadiri oleh Menhan RI, Ryamizard Ryacudu

Konstelasi Publik

1. Mnybulkn Pro & Kontra
2. LSM & NGO Mengkritisi / Menolak.
3. Menjadi wacana publik setiap dibahas



UU PSDN

Isi

1. Gabungan antara RUU Komcad, RUU Komduk, RUU Belneg
2. Mnjd Dasar Pelaksanaan Belneg
3. Mnjd Dasar Pelatihan Dasar Kemiliteran

Pngesahan

# Pasal 4 UU PSDN

1. Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.
2. Keikutsertaan Warga Negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. pendidikan kewarganegaraan;
  - b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
  - c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
  - d. pengabdian sesuai dengan profesi.

# Pasal 5 UU PSDN

1. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan bentuk pembekalan kemampuan dasar militer bagi Warga Negara.
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan.
3. Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib untuk pembentukan calon Komponen Cadangan.
4. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan Komponen Cadangan.

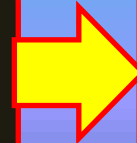
# PENDEKATAN BELNEG : "KONSENSUS NASIONAL"

**PANCASILA**



**DASAR NEGARA**

**UUD NRI 1945**



**KONSTITUSI NEGARA**

**NKRI**



**BENTUK NEGARA**

**BHINEKA TUNGGAL IKA**



**SEMBOYAN NEGARA**



# RELASI NILAI-NILAI BELA NEGARA DENGAN KONSEP TRISAKTI

Aplikasi Bela Negara & Trisakti  
Dalam Konteks Indonesia  
Kekinian

Indonesia  
Berdaulat Secara  
Politik

nilai-nilai  
kejuangan,  
kebangsaan,  
nasionalisme,  
patriotisme, dan  
bela negara

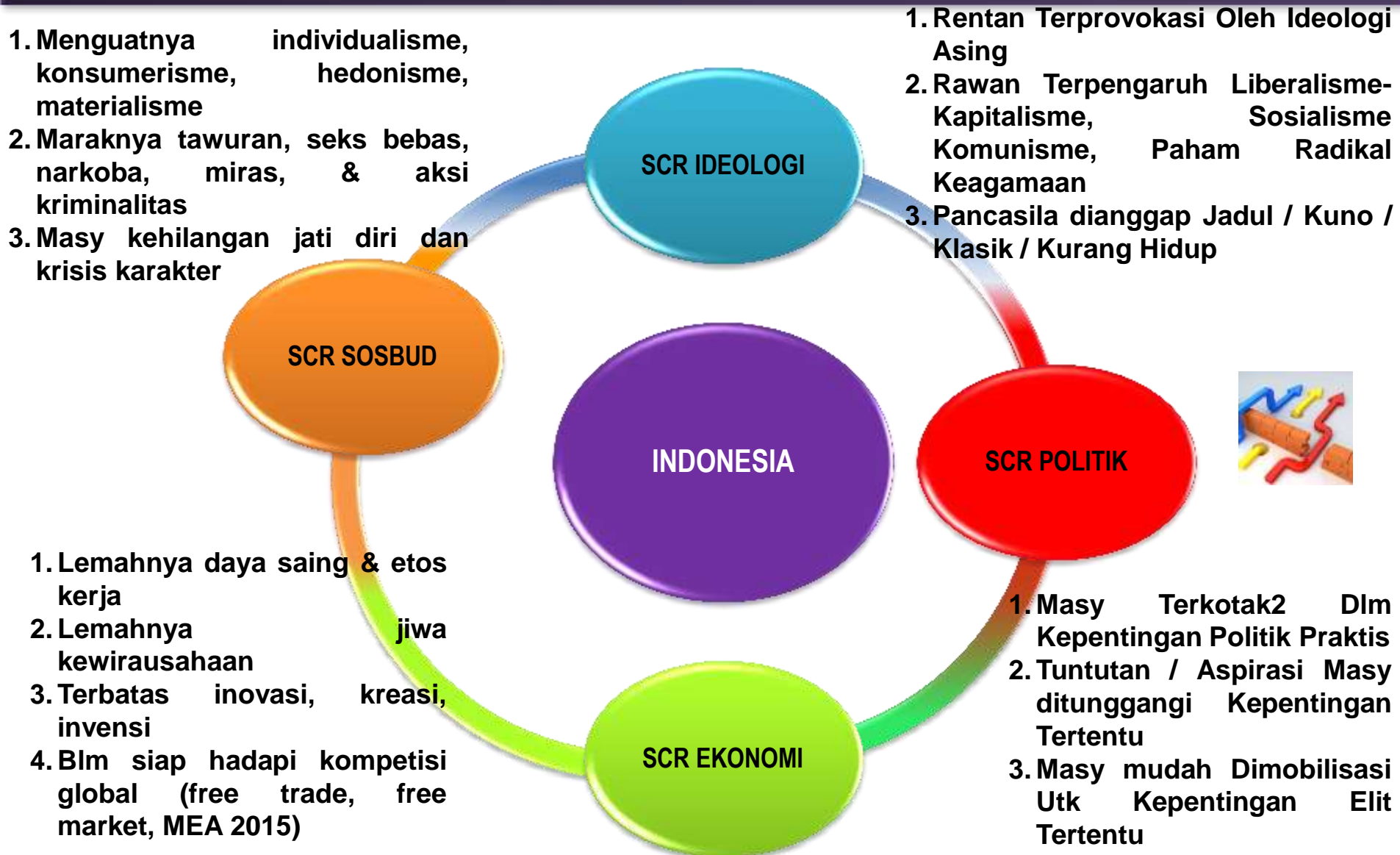
Indonesia  
Berdikari Secara  
Ekonomi

nilai-nilai inovasi,  
kreasi, dan invensi  
(penemuan baru)

Indonesia  
Berkeperibadian  
Secara Budaya

nilai-nilai toleransi,  
gotong royong,  
tanggung rasa,  
humanis, protagonis,  
sopan, santun, dan  
simpatik

# MENGAPA INDONESIA MEMBUTUHKAN BELA NEGARA?



# MENGAPA PERLU “BELNEG”?

POTRET  
MASYARAKAT  
YANG  
INTOLERAN DI  
ERA  
GLOBALISASI

LUNTURNYA NILAI :

- NASIONALISME
- PATRIOTISME
- CINTA TANAH AIR

**WAWASAN “KEGLOBALAN”**

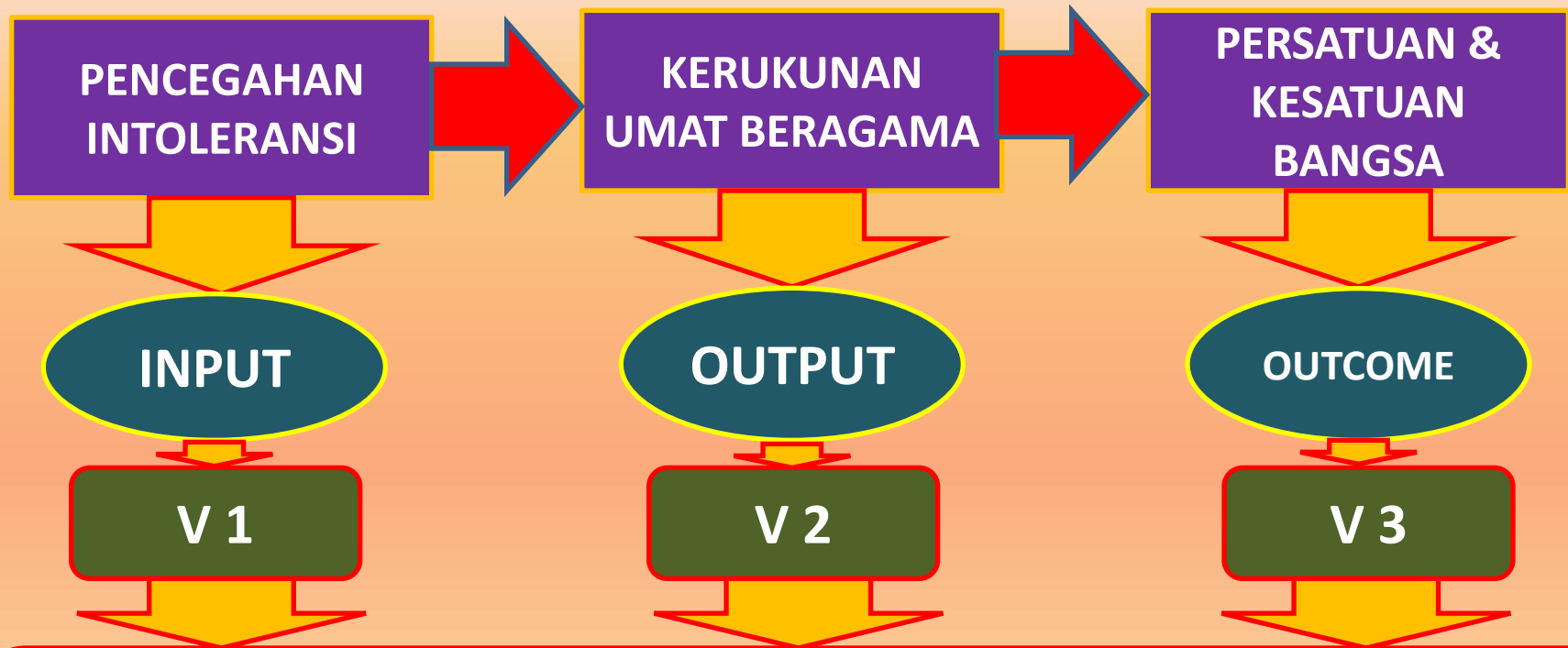
- MEMUJA RADIKALISME
- MENGIKUTI FANATISME
- TERBUAI RADIKALISME
- TERBELENGGU  
FUNDAMENTALISME
- TERJEBAK TERORISME

**WAWASAN “KEDAERAHAN”**

- MENGUATNYA  
PRIMORDIALISME
- MENGUATNYA XENOPHOBIA
- SEMANGAT ETNISITAS
- SENTIMEN KESUKUAN
- BERTINDAK RASIS

# RELASI INTOLERANSI & PERSATUAN BANGSA

“PENCEGAHAN **INTOLERANSI** GUNA MENINGKATKAN **KERUKUNAN UMAT BERAGAMA** DALAM RANGKA MEMPERKOKOH **PERSATUAN & KESATUAN BANGSA**”



- Semakin **konsisten** pencegahan intoleransi, maka semakin **meningkatkan** kerukunan umat beragama & semakin **memperkokoh** persatuan & kesatuan bangsa.
- Semakin **tidak konsisten** pencegahan intoleransi, maka semakin **melemahkan** kerukunan umat beragama & semakin **mengikis** persatuan & kesatuan bangsa.

# RELASI INTOLERANSI, RADIKALISME & TERORISME



- Tindakan Intoleransi dapat berpotensi menyebabkan perilaku radikal.
- Perilaku radikal dapat mengarah pada terciptanya aksi teror.

- Aksi Teror mengganggu **kerukunan umat beragama**.
- Terganggunya kerukunan umat beragama **mengancam persatuan & kesatuan bangsa**.

# INTOLERANSI, RADIKALISME & TERORISME

Memahami Intoleransi,  
Radikalisme & Terorisme

Intoleransi

Sikap & perilaku yg  
tdk mentolerir  
trhdp perbedaan &  
krng mnghargai  
keberagaman

Radikalisme

Suatu gerakan  
melakukan  
perubahan secara  
cepat melalui  
cara kekerasan.

Terorisme

Serangan terkoordinasi  
yg melukai &  
membunuh melalui  
cara2 kekerasan dgn  
tujuan politis &  
menyita perhatian  
publik

# PERSPEKTIF PENCEGAHAN INTOLERANSI

## Pencegahan Intoleransi Dilihat Dari 3 Perspektif

**Perspektif  
Lintas Agama**

**Nilai-Nilai  
Keagamaan, Religi  
& Dialogue of  
Civilizations**

**Perspektif  
Kearifan Lokal**

**nilai-nilai budaya,  
kultur, sosial,  
lokalitas, adat  
istiadat**

**Perspektif  
Belneg**

**Nilai-Nilai  
Nasionalisme,  
Patriotisme, Cinta  
Tanah Air**

# BELA NEGARA SEBAGAI PENANGKAL INTOLERAN

**Program Pendidikan &  
Pelatihan Bela Negara**

**Ditanamkan Kepada  
Semua Komponen  
Bangsa**

**Siswa/Mhs**

Dilakukan di lembaga pendidikan, baik di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pesantren, dll

**Ormas /LSM**

Pelatihan belneg Scr rutin kpd pengurus & anggota Ormas, LSM, Tomasy, Toga, Todat, Tkh Pemuda, dll

**Komunitas  
Bisnis**

Diberikan kpd semua masy pengusaha, komunitas bisnis, CEO, & semua pelaku usaha Indonesia

**Birokrasi  
Pemerinthn**

Ditujukn pada aparat PNS / ASN baik di K / L maupun di Pemda Prop / Kab / Kota



# BAGAIMANA STRATEGI MENANAMKAN BELA NEGARA KEPADA SISWA (SD, SMP, SMA/SMU)?

Di Dlm  
Kelas

- Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
- Muatan : Nilai2 revolusi Mental, Belneg, Wasbang
- Metode : Sosialisasi, Pemahaman, Keteladanan, Diskusi, Dialog, Interaktif, Outing, Kunjungan Obyek Tertentu
- Cara Penyampaian : Bahasa Yg Mudah Dicerna, Mudah Dipahami, Hindari Bahasa Yg Abstrak / Bahasa Dewa2 yg susah dicerna

Ekstra  
Kurikuler

- Kegiatan Organisasi Kesiswaan : OSIS, Pramuka, PMR, dll
- Materi : Pengenalan organisasi, baris berbaris, pengenalan alam, orientasi lingkungan, outbound.
- Fokus : Mencintai sesama manusia, tumbuh nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air
- Hasil : Bangga Menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)

# BAGAIMANA STRATEGI MENANAMKAN BELA NEGARA KEPADA MAHASISWA?

Pra  
Mhs

- Penanaman Nilai2 Belneg Ketika Pelajar Slesai Ikuti UN (Ujian Nasional)
- Penanaman Nilai2 Belneg Ketika Calon Mhs Mengikuti semacam Ospek
- Metode : Sosialisasi, pembekalan, penataran, Outbound, dll
- Sifat : Dialogis, Interaktif, Aqliktif, Bahasa Lugas, Mudah Dicerna

Saat  
Mhs

- Penanaman Nilai2 Belneg Saat Mhs mengikuti MK Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
- SAP, GBPP, Modul harus diarahkan bermuatan revolusi mental, wasbang, dan belneg
- Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Studi Kasus, Diskusi Kelompok, Kunjungan Ke Obyek Tertentu
- Kunci Keberhasilan : Dosen hrs mampu jabarkan nilai2 revolusi mental dan Belneg yang aplikatif terhadap prodi / fak masing2 mhs

Pasca  
Mhs

- Penanaman Nilai2 revolusi mental & Belneg setelah mhs ujian skripsi / sebelum wisuda
- Bentuk : Pembekalan & Sosialisasi Agr siap aplikasikan Belneg di dunia kerja / masyarakat
- Tujuan : Refresh / Peningat untuk selalu pegang nilai2 revolusi mental & Belneg
- Outcome : Mhs berwawasan kebangsaan & berkesadaran bela negara

# APA SAJA KESIAPAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENANAMAN NILAI-NILAI BELA NEGARA?

## Kesiapan Instrumental

Perlu Payung Hkm :  
UU Komcad,  
UU Komduk,  
UU Belneg,  
UU Wanus

DPR & Pemerintah  
sdh sahkan UU  
PSDN, 26 Sept 2019

## Kesiapan Struktural

Perlu Lembaga :  
Badan  
Penanaman  
Wawasan  
Kebangsaan dan  
Bela Negara  
(BPWKBN)

Bersifat Nasional,  
Permanen, ada di  
Pusat, Prop, Kab/Kota

## Kesiapan Kultural

Perlu Persepsi,  
Dukungan, &  
Bantuan :  
Semua Masy,  
Khususnya Masy  
Sipil (Civil Society)

Jangan Sampai Ada  
Tuduhan Ingin  
Kembali Ke Masa Lalu  
/ Orba

# **APA SAJA KESIAPAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENANAMAN NILAI-NILAI BELA NEGARA?**

**Kesiapan  
SDM**

**Perlu Kualitas  
& Kompetensi :  
Pendidik,  
Pelatih, Trainer,  
Instruktur**

**Prosentase Materi Non  
Fisik Pd Diklat Belneg hrs  
proporsional dgn Materi  
Fisik**

**Kesiapan  
Anggaran**

**Perlu Komitmen  
Penganggaran :  
Alokasi APBN &  
APBD Untuk  
Membiayai  
Penynggaran  
Belneg**

**Pemerintah & DPR,  
baik di Pem Pus &  
Pemda Prop, Kab,  
Kota**

**Kesiapan  
Sarpras**

**Perlu Kelengkapan  
: Sarpras, Logistik,  
Alsus, Alkung,  
Mess, Tempat  
Latihan, sarana  
outbound, dll**

**Utk Sementara  
menggunakan  
fasilitas TNI, Polri,  
Pemda**

# **APA SAJA YANG HARUS DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI BELA NEGARA?**

## **KOORDINASI**

Menyatukan persepsi & menyamakan pandangan antar K/L negara dlm memahami, menghayati, menjiwai, & menerapkan Belneg shg satu persepsi & satu pandangan

## **SINKRONISASI**

Menyelaraskan / mengharmonisasikan Materi & kurikulum pendidikan & pelatihan (Diklat) Bela Negara Yang Bersifat Nasional, Standar, Terukur, Aplikabel, & Workabel

## **SINERGI**

Menyusun, mensinergikan & mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Bela Negara (RAN Belneg) baik di pusat maupun di daerah sehingga menjadi gerakan yg massif, luas, sistematis, & berkelanjutan

## **INDEKSASI**

Menyusun Indeks Bela Negara (IBN), dengan indikator yg disepakati, shg setiap thn pemerintah dpt mengukur & menetpkn IBN setiap propinsi, kab/kota di seluruh Indonesia



**Sekian & Terima Kasih**

<https://agussubagyo1978.wordpress.com>

HP : 08121 40 4745

**Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si**  
**Komplek Tirta Kencana Blok C No 7**  
**Jln Pasantren Cibabat Cimahi**  
**Phone / fax : (022) 6612003**  
**HP : 081 21 4047 45**  
**Email : subagyo1978@mail.com**  
**subagyoeti@yahoo.com.au**  
**Facebook : agus subagyo**  
**Twitter : subagyoagus**  
**Instagram: agussubagyo1978**  
**Blog :www.agussubagyo1978.wordpress.com**



**facebook.**

**facebook**

Facebook helps you connect and share with  
the people in your life.

**twitter**

# **CURICULUM VITAE**

## **DR. AGUS SUBAGYO, S.IP, M.SI**

1. Nama : Dr. Agus Subagyo, S.IP, M.Si
2. Tempat & tanggal lahir : Sukoharjo, Solo, 18 April 1978
3. Pekerjaan : Dosen & Dekan FISIP UNJANI Cimahi
4. Riwayat Pendidikan :
  - S1 : FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  - S2 : FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
  - S3 : FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
5. Riwayat Mengajar
  - Mengajar di Unhan Jakarta
  - Mengajar di Pusdikintel Polri
  - Mengajar di Sesko TNI Bandung
  - Mengajar di Seskoad Bandung
  - Mengajar di Seskoau Lembang
6. Riwaya Pekerjaan
  - Ketua LSM “Institute for Community Development”, Cimahi
  - Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Manajemen Konflik, UMY, Yogyakarta
  - Ketua Center fo Democracy and Civil Society, UMY, Yogyakarta
  - Ketua Pusat Kajian Pemerintahan dan Masyarakat UNJANI, dll